



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SABANG
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYARBINI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 407386

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.630.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 330 m2/170 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 590.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 360 m2/65 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 590.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 18.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 55.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 183.161.863

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.886.161.863

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.886.161.863

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SABANG

UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAMSURIZAL

2. Jabatan : SEKRETARIS

3. NHK : 625372

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 325.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 335 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 105.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA G Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 435.000.000

III. HUTANG Rp. 160.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 275.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SABANG
UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JIMMIDIN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 626287

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 275.600.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 242.000.000
2. Tanah Seluas 96 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 33.600.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 16.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA C70 Tahun 1970, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY NC11C1C A/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 7.448.803

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 299.048.803

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 299.048.803

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2022/Khusus - Awal Menjabat)****BIDANG : EKSEKUTIF****LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SABANG****UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **BUDIMAN**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **864491**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 475.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 213 m2/96 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 10.000.000**

1. MOTOR, HONDA X1B02R07L0 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ---****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 16.089.769****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ---****Sub Total** **Rp. 501.089.769****III. HUTANG** **Rp. 97.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp. 404.089.769****Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.